



**PEMERINTAH PROVINSI MALUKU  
SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, 97124 Telp : (0911) 354060  
Website : [www.malukuprov.go.id](http://www.malukuprov.go.id), Email : [setdamaluku09@gmail.com](mailto:setdamaluku09@gmail.com)

**KEPUTUSAN KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
NOMOR : 63/RoPem/II/2022**

**T E N T A N G  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA MALUKU TAHUN 2022**

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SETDA MALUKU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 1958, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 79) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1617);
2. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama dilingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Perjanjian Kinerja;
9. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
10. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 99 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Provinsi Maluku.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku untuk menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) atau Rencana Kerja Tahunan (Renja), mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), menyusun dokumen Perjanjian Kinerja (PK), menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku Tahun 2022
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Ambon  
Pada tanggal 25 Januari 2022

---

**KEPALA BIRO PEMERINTAHAN DAN OTDA  
SETDA MALUKU,**



**D. N. KAYA, S.Sos. M.Si**  
**PEMBINA TK. I**

**NIP. 19690609 198902 1 002**



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BIRO  
PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH  
SETDA MALUKU

NOMOR : 64/RoPem/I/2022

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI  
DAERAH SETDA MALUKU TAHUN 2022

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 2022**

**NAMA OPD** : **Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Maluku**

**TUGAS** : **Membantu Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama.**

**FUNGSI** : **1. Penyiapan perumusan kebijakan daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;  
2. Penyiapan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;  
3. Penyiapan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan, otonomi daerah dan kerja sama;  
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat**

NO	KINERJA UTAMA		INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ALASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN USULAN HASIL REVIU	SUMBER DATA
	TUJUAN	SASARAN			
1	Terwujudnya penguatan peran Gubernur sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi dan pelaksanaan implementasi otonomi daerah yang handal dan berkualitas	Terwujudnya implementasi kebijakan pemerintah dalam rangka peningkatan peran gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah	Presentase kebijakan yang terimplementasi dalam rangka penguatan peran	Jumlah kebijakan pemerintah sebagai peran Gubernur dibagi keseluruhan kebijakan dikali 100%	Renstra Biro

2	Mewujudkan implementasi otonomi daerah yang semakin handal dan berkualitas	Terbinanya pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten/Kota melalui penyusunan dan Pelaporan LPPD dan EPPD	Presentase LPPD dan EPPD yang berkualitas	Jumlah Kab/Kota dan OPD lingkup Provinsi yang menyampaikan dibagi jumlah Kab/Kota se-Maluku dan OPD lingkup Provinsi dikali 100%	Dokumen LPPD Provinsi Maluku
		Terwujudnya fasilitasi dan pelaksanaan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Presentase fasilitasi penerapan SPM	Jumlah Kab/Kota dan OPD lingkup Provinsi yang menyampaikan dibagi jumlah Kab/Kota se-Maluku dan OPD lingkup Provinsi dikali 100%	Dokumen LPPD Provinsi Maluku
		Terwujudnya koordinasi dan fasilitasi kebijakan pemekaran daerah dan otonomi daerah	Presentase fasilitasi pemekaran daerah dan otonomi daerah	Jumlah Usulan Pemekaran Daerah yang terfasilitasi dibagi jumlah usulan pemekaran DOB dikali 100 %	<i>grand design</i> penataan daerah otonomi baru
3	Terwujudnya peningkatan tugas-tugas pembinaan administrasi kewilayahan melalui koordinasi yang sinergitas dengan instansi terkait dan stakeholder masyarakat	Terwujudnya fasilitasi penataan pertanahan sesuai aturan yang berlaku	Penataan penguasaan, kepemilikan dan pemanfaatan tanah bagi kepentingan umum	Jumlah lokasi yang ditetapkan dibagi jumlah lokasi perencanaan dikali 100%	SK Penetapan Lokasi
		Terwujudnya fasilitasi dan kebijakan toponimi dan penamaan rupa bumi guna memperkuat integritas dan eksistensi daerah.	Presentase nama-nama rupa bumi yang terverifikasi sesuai target	Jumlah nama-nama rupa bumi yang telah diverifikasi dibagi jumlah yang diinventarisir dikali 100%	Permendagri tentang Data Wilayah administrasi pemerintahan
		Tersedianya data kerja sama antar daerah dan implementasi kesepakatan kerjasama antar daerah	Persentase data kerjasama antar daerah yang dilaksanakan	Jumlah kerja sama yang dilaksanakan dibagi jumlah usulan kerja sama dikali 100 %	MoU dan PKS
4	Mewujudkan pelaksanaan pembinaan pemerintahan desa/negeri dan pembinaan pemerintahan kecamatan secara efektif, dalam rangka implementasi penguatan	Terwujudnya koordinasi dan percepatan penerapan PATEN pada tataran pemerintahan kecamatan	Persentase Kabupaten/ Kota yang menerapkan PATEN	Jumlah Kab/Kota yang menerapkan PATEN dibagi jumlah Kab/Kota yang ditargetkan dikali 100 %	Peraturan Bupati/Walikota tentang pelimpahan sebagian wewenang Bupati/Walikota kepada Camat sesuai Peraturan



peran gubernur sebagai wakil pemerintah				Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008, SK Lokasi Penetapan Inovasi Penerapan PATEN
	Terwujudnya fasilitasi dan koordinasi usul pemekaran kecamatan, serta data peningkatan status dusun menjadi desa/ negeri.	Presentase fasilitasi pemekaran desa dan kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kecamatan dibagi jumlah Kab/Kota se-Maluku 100%	Permendagri tentang Data Wilayah administrasi pemerintahan dan Keputusan Gubernur tentang data wilayah adm Provinsi Maluku
	Terbinanya Penyelenggaraan dan Pembinaan Pemerintahan Kecamatan serta Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Presentase Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan dan Kecamatan	Jumlah Kab/Kota pembinaan dibagi jumlah Kab/Kota se-Maluku dikali 100%	Permendagri tentang Data Wilayah administrasi pemerintahan dan Keputusan Gubernur tentang data wilayah adm Provinsi Maluku

Ambon, 25 Januari 2022

Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi

Daerah Setda Maluku,



D. N. Kaya, S.Sos, M.Si  
Pembina Tk.I

NIP. 19690906 198902 1 002